

# MORALITAS DIMASALAHKAN

Oleh : Bambang Widodo

## 1. Pendahuluan

Apabila pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", maka sewajarnya apabila di antara sasaran PJP-II menentukan:

*Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan hidup di akherat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional, secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.*

Sebab pada kenyataannya kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan beberapa kejanggalan.

Diantara kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah timbulnya penyimpangan dalam hubungan "reciprocity" (hubungan timbal balik yang tidak didasarkan kepada hak dan kewajiban berdasarkan hukum) yang ditunjukkan dari fenomena korek api sebagai alat hubungan saudara-saudara kita antara petugas polisi dengan pengemudi angkutan truk yang setiap hari lewat di jalan tol Cikampek dan mungkin juga di tempat-tempat lain. Pemandangan ini saya amati sudah berjalan kurang lebih empat tahun selama menelusuri per-

jalan rutin Lembang-Jakarta p.p, yang seolah-olah sudah merupakan suatu kegiatan terbiasa di tempat-tempat tertentu pada jalur jalan tol. Mobil patroli diparkir, kemudian salah seorang action pungut sana pungut sini, mereka terlihat amat lusuh dan capek apalagi di tengah terik matahari, kadang-kadang sampai kewalahan namun kadang kala juga sepi, nggak mestilah. Inilah fenomena kita yang di bidang lain pun juga ada yang serupa yaitu terjadinya pengikisan hubungan *patron klien* (pelindung dengan yang dilindungi) atau menurut Scott, J.C (dalam Rusidi, 1989:2) dikatakan

Sebagai "*the erosion of patron-client bond*". Tererosinya hubungan tersebut terutama di bidang pertanian namun hal itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi pula di bidang hukum, bidang kesehatan dan bidang-bidang lain. Erosi tersebut disebabkan oleh pengaruh cara berpikir dan bertindak ekonomis pada jenis-jenis pekerjaan yang semestinya dituntut jiwa *altruisme* suatu pengabdian yang seharusnya mendahulukan kepentingan orang lain dari pada dirinya, pengabdian yang meletakkan motivasi prestise atau suatu kehormatan bagi pelaksananya dan sama sekali bukan semata-mata mencari imbalan materi seperti halnya pekerjaan polisi. Dari dua di antara sekian banyak fenomena semacam dalam kehidupan sosial, kita bisa tanyakan: "Sebenarnya apa gerangan yang terjadi di balik pagelaran fenomena tersebut, lalu apa kaitannya dengan soal moral". Saya pikir, pagelaran itu bukanlah sekedar tindakan seorang oknum polisi yang tidak cukup mendapat kesejahteraan atau hanya sekedar

perilaku menyimpang. Ada kecenderungan fenomena ini merupakan suatu pagelaran sosial karena ia dalam panggung kehidupan manusia yang seharusnya tumbuh keselarasan hubungan antara manusia juga dengan Tuhan-nya seperti apa yang ditetapkan dalam undang-undang maupun tujuan pembangunan nasional. Tetapi fenomena itu nekad jalan terus dan juga di banyak bidang, pada hal upaya-upaya juga sudah dilakukan: Opstib, Opsih, Waskat telah dikerahkan, apalagi? seminar, lokakarya, pemikiran para pakar, diapun tetap bandel. Memang repot dan sangat repot, penyakit apa gerangan?

## 2. Apa yang sedang terjadi?

Mengapa pungutan korek api itu dilakukan oleh aparat? Jawabannya bisa sederhana bisa juga cukup rumit. Pertanyaan ini memang sia-sia manakala kita hanya melihat gejala di permukaannya saja dan justru menjadi aneh, bisa-bisa mempertanyakan hal tersebut di-bilang kita ini sok suci, seperti dirinya nggak pernah berbuat semacam itu. Ngapain mesti mengada-ada, memasalahkan, ngrasani, mengeluh, menyalahkan dan lain sebagainya, yang penting toh kita sudah berusaha, sekarang ini kita mesti pandai-pandai, jangan menantang arus juga jangan terbawa arus, kalau sampai ketahuan yaa salahnya sendiri. Bayangin, apa yang tersirat dari jawaban tersebut, seolah-olah perbuatan demikian sudah menjadi lumrah bukan. Dan macam-macamlah pelecahan demikian yang secara manifes (nyata) biasanya muncul sambil bodor-bodoran, guyonan atau plesetan. Namun secara laten (tersembunyi) dalam lubuk hati yang terdalam tentu kita masih mengakui "memang memalukan" atau mungkin ada sesuatu tujuan, tak tahulah.

Durkheim, dalam bukunya *Moral Education* (1961) menganjurkan cara untuk memahami fakta sosial seperti itu dengan mempertanyakan lebih dahulu dalam dua hal sebelum kita memecahkan masalahnya, pertanyaan yang mendasar: (1) Bagaimana sesuatu itu meng-ada sebagaimana adanya sekarang ini, dan (2) Bagaimana kedudukan sesuatu yang timbul tersebut dalam sistem sosial. Pada masanya, Durkheim sangat

terpukau oleh aspek moral dalam kehidupan sosial saat itu di mana perkembangan ekonomi sangat mengacaukan solidaritas sosial. Dia menjelaskan bahwa moral dan hukum itu pada dasarnya merupakan kebutuhan sosial yang hanya bisa dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Untuk menelaah fenomena seperti saya sampaikan di atas barangkali masih memungkinkan menggunakan cara Durkheim tersebut, ini dikandung maksud agar kita mengetahui permasalahan secara benar sehingga tidak terseret pada pemecahan masalah yang bukan sebenarnya masalah. Kesalahan menentukan masalah pada gilirannya menjadikan semakin ruwet masalah yang sebenarnya, yang mungkin justru menghasilkan persoalan baru. Cara Durkheim tersebut bukannya untuk menelaah terlembaganya norma pada sikap individu secara imperatif (keharusan) atas kerja polisi, bukan pula untuk menelaah reaksi orang-orang terhadap gambaran bekerjanya polisi tetapi untuk menelaah hubungan antara sistem kepercayaan normatif yang di dalamnya juga termasuk falsafah, doktrin, kode etik, juklak, juknis dan semacamnya sebagai cara bertindak atau cara kerja yang disepakati dan dipolakan yang seharusnya mengikat sikap dan tindakan individu tetapi menyimpang dalam pelaksanaan. Durkheim memberi contoh, pada saat di Eropa golongan protestan banyak melakukan bunuh diri, ternyata setelah dia teliti orang-orang tersebut merasa sangat tertekan dengan perkembangan keadaan sosial karena aturan-aturan agama protestan sangat ketat juga solidaritas masyarakat protestan waktu itu sangat lemah jalan keluar para penganutnya yang tidak mampu menerima kenyataan sosial lebih baik mati saja (suicide).

Sebagaimana saudara kita mungutin korek, tak cukup hanya kita bilang itu memalukan polisi, itu melanggar kode etik, kita harus kejuangan, sementara yang lain juga menerima lemparan yang lebih dari pada itu, belum lagi begitu keluar P3 atau jatah bbm untuk patroli dibagikan. Saudara-saudara kita mengerti betapa besarnya pengeluaran pimpinan, kebutuhan yang harus disediakan untuk tugas sebagai pimpinan, untuk menghadapi tamu-tamu. Barangkali keseimbangan arus ke atas

dengan cucuran ke bawah yang menjadi masalah walaupun hingga kini belum pernah ada suatu penelitian tentang pengaruh dari perimbangan arus tersebut, namun salah satu orientasi kepemimpinan antara lain juga perhatiannya terhadap kesejahteraan bawahan termasuk keteladan dan lain-lain.

Kita paham bahwa dewasa ini perubahan sosial berjalan sangat cepat hal ini tentu mempengaruhi pula sikap individu-individu, termasuk polisi. Nilai-nilai budaya ideal yang berlaku bagi masyarakat yang di dalamnya termasuk juga polisi. Nilai-nilai seperti nilai kejuangan dalam perkembangan sosial memungkinkan menjadi penyekat atau pembatas semu perilaku apabila tidak mendapat penyaluran yang sesuai sebab nilai-nilai riil baru yang lahir dalam kehidupan nyata ternyata berubah dalam kebolehdjian dan kemanfaatan. Hal ini menyebabkan kebingungan maupun membawa kekaburan dalam pelaksanaan yang seharusnya mengacu pada nilai-nilai moral atau nilai-nilai kejuangan yang katanya harus dijaga kelestariannya.

Hukum moral yang seharusnya mampu menyelaraskan perubahan dengan tuntutan nilai-nilai moral namun kenyataannya dapat kita lihat sendiri penafsiran atau penjabarannya belum memenuhi harapan. Kita sering mendengar omongan, sudah ditatar P-4 pola sekian jam dan entah sudah yang keberapa kali ikut-ikutan penataran sejak letnan sampai sekarang namun sikap dan tindakannya yaa begitu-begitu saja. Pelecehan demikian kadang kala disampaikan dengan emosi, sok berani, sok jago, macam-macam lah. Tapi ini pun juga sulit disalahkan mungkin juga saking keselnnya.

Dari sinilah moralitas dimasalahkan. Mengapa demikian?

### 3. Dilema historis.

Dengan mengambil manfaat merenungi masa lalu, kiranya akan dapat kita temukan cacat-cacat atau kesalahan langkah kita, dan dengan penuh harap kiranya berguna untuk membenahi masa yang akan datang yang tentu tidak dengan apriori, namun melihat makna kehidupan dalam jangkauan arti sejarah. Menoleh kebelakang boleh jadi kita

banyak melihat diri kita berbuat sesuatu yang melulu berdasarkan pertimbangan kata hati atau kesadaran personal, sulit memegang komitmen atau menghargai karya orang pendahulu, bisa saja kita kotak-katik biar seakan akan sambung menyambung tapi tidak bisa dipungkiri ada link di antaranya. Memang setiap orang itu memiliki titik-titik lemah atau titik gelap dalam sikap pribadinya maupun tindakan-tindakan yang hanya mendasarkan kepada apa yang diinginkannya sendiri (individual-subyektif). Kita bisa melihat bahwa kepentingan orang lain lebih besar atau tidak lebih besar dibanding dengan kepentingan kita sendiri. Hal ini selalu tumbuh selama kita berpartisipasi dalam kehidupan dan sejauh masih ada kehidupan kolektivitas yang di dalamnya diri kita juga terikat, Kehidupan kelompok atau masyarakat dapat dalam wujud keluarga, organisasi, kota, bangsa, nasional maupun internasional. Buat bangsa yang beraneka ragam di dunia ini kita kenal hirarkhi untuk menemukan moralitas setiap bangsa sesuai besarnya kelompok, tingkat kompleksitas, spesialisasi maupun dari umurnya.

Kehidupan moralitas bermula dari kehidupan kelompok atau masyarakat betapapun kecilnya, karena hanya di situlah kepedulian dan pengabdian punya makna. Dari situ kita bisa melihat mana yang dikatakan baik dan mana yang buruk, yang secara langsung akan memperoleh suatu karakter sehingga melekat dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat, ia tak lekang oleh panas dan takkan lapuk oleh hujan, biar direayasa maupun diobrak-abrik ilmu pengetahuan dan teknologi dia tetap ada dan melekat dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat. Cita-cita moral itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat manusia karena dia ada sebelum kita ada, cita-cita itu merupakan sesuatu bentuk khusus dari cita-cita kemanusiaan dan sebagian besar sesuai dengan tipe manusia secara umum maka kepadanya kita semua mengikatkan diri. Contoh, bila seseorang mencintai kemanusiaan maka ia tidak akan dapat melihat penderitaan sesama manusia tanpa turut merasakan derita orang dan berkeinginan untuk membantu. Pada saat manusia belum bermasyarakat polisi itu juga sebuah cita-cita,

cita-cita hidup teratur sebagai nilai moral intrinsik masyarakat manusia. Nilai moral intrinsik (hakekatnya) bagian dari kehidupan yang di dalamnya adalah polisi yang identik bagian dari moral atau miliknya moral, artinya apabila kita mengenal baik dan buruk maka identik kita mengenal polisi sebagai pencerminan dari pada moral. Moral tidak mengenal siapa manusianya tetapi sebaliknya manusialah yang kenal moral, dengan demikian walaupun ada stratifikasi atau lapisan-lapisan dalam masyarakat namun bukan untuk membedakan terhadap klasifikasi berlakunya moral atau berlakunya polisi. Moral, di satu pihak adalah sebagai dasar dari konsensus sosial atau alat perekat utuhnya masyarakat, di lain pihak moral hanyalah sebagai norma atau cita-cita menurut tatanan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan sosial. Moral bukanlah alat untuk mencapai cita-cita, moral dapat dikatakan tidak lebih sekedar sebagai produk, hasil atau akibat bila dibanding sebagai sebab. Maka dari itu kotbah-kotbah, anjuran-anjuran moral, atribut-atribut ataupun simbol-simbol yang sering dipajang tentang himbuan dipatuhinya moral tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah moral. Walaupun moral itu tidak nampak tetapi ada dan terus ada sebab dia ada sebelum kita ada sampai kapanpun.

Namun menterlantarkan moral sendiri sama artinya dengan tidak menjamin tumbuhnya solidaritas sosial atau menjaga nama baik bangsa, dalam organisasi dapat dikatakan sebagai tidak menjaga nama corps. Lalu apakah saudara kita itu kurang mengamalkan nilai-nilai kejuangan dengan memunguti korek api. Atau memang sudah kehabisan rasa malu, atau penafsiran dan penjabarannya dari pada moral yang tidak sejalan dengan kenyataan, atau nilai-nilainya yang kurang akomodatif? Begitu-lah kita beratau-atau terus. Suatu konsekuensi apabila kita tetap pada komitmen mempertahankan nilai-nilai luhur maka penafsiran dan penjabaran isi tiap-tiap nilai itu harus dilakukan secara dinamis, sebab apabila proses ini tidak terjangkau memungkinkan kita terseret lebih jauh ke dalam sikap kepura-puraan atau kemunafikan dan ini merusak tanggung jawab

moral bagi seseorang apalagi bagi calon-calon pimpinan bangsa. Inilah kekuatan nilai moral.

Berkaitan dengan moral polisi, masyarakat itu mempunyai ciri otoritas moral yang mengharuskan adanya rasa hormat. Rasa hormat itu tadi menjadikan kita tunduk kepada moral imperatifnya (keharusan). Otoritas moral adalah karakteristik yang diatribusikan kepada sesuatu yang ideal maupun yang riil dan dipandang sebagai sesuatu lebih unggul dari pada kekuatan moral kita sendiri. Jadi masyarakat memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk pengalihan aturan tingkah laku tertentu terhadap imperatif yang sama.

Sekarang tinggal lagi kita bagaimana melihat dalam suatu fenomena yang melanggar aturan-aturan moral itu menjadi perhatian atau menarik sumber otoritas moral atau tidak, apabila menjadikan sebagai suatu kewajiban maka tidak bisa tidak sumber otoritas moral harus memberi dukungan lahirnya moral polisi sebab tidak ada sesuatu aturan moralpun yang bukan produk dari faktor-faktor sosial tertentu yang menguasai sumber otoritas moral secara keseluruhan, dan bermusuhan dengan moral itu tidak akan ada habisnya sebab dia tetap memberikan cap baik buruk, nggak mau kalah ataupun mengalah, dasar moral sampai kapanpun ia tetap tegar.

Dengan demikian kalau kita mengetahui dan memahami moral maka fenomena korek api itu tidak berdiri sendiri, ia merupakan salah satu pancaran penderitaan sesama manusia dipandang dari tujuan yang tidak layak untuk dicapai dan dikehendaki. Seyogyanya kita berani menjauhkan diri dari kepura-puraan, sebab moral itu tidak melihat hanya dari satu sisi tetapi secara menyeluruh ia bicara. Meletakkan polisi pada tatanan sosial dengan memandang secara wismoyo membantu terkikisnya fenomena korek api, sedangkan membiarkan polisi sendiri buruk sama halnya dengan mentelantarkan moral.

#### 4. Dari mana kita mulai?

Ini pertanyaan yang saya tawarkan bagi mereka yang memiliki kepedulian atas lahirnya fenomena-fenomena yang saya jelaskan di atas. Tidak cukup mudah kita menyadari

sejarah kelahiran peran polisi. Secara umum dihadapkan dalam dua pertumbuhan peran yang mewamahi karakteristik moral (saya mengandaikan di sini polisi benar-benar identik dengan fungsi dalam kehidupan masyarakat). Bagaimanapun faktor proses kelahiran akan mempengaruhi pertumbuhan peran polisi walaupun belum pernah ada studi atau penelitian mengenai hal itu, dan barangkali juga lebih baik ditinggalkan saja karena mungkin dapat merencanakan peran kita yang sudah mulai dibangun selama ini. Namun karena faktor ini memang penting maka jauh lebih baik apabila kita menelaah untuk dapat memperoleh pengertian yang baik agar dapat diatasi setidaknya sebagian akibat dari faktor tersebut. Yang jelas sekarang fakta yang dipertentangkan adalah moral dalam semua sistem yang dipraktikkan manusia merupakan fungsi dari organisasi sosial atau sistem sosial. Bicara demikian kita adalah penganut perspektif fungsional struktural (Parsons, 1951) yang selalu menjaga keseimbangan, konsensus, saling keterkaitan antar fungsi. Namun sejarah juga sering memberikan petunjuk, kecuali dalam kasus-kasus yang abnormal bahwa setiap masyarakat pada prinsipnya mempunyai satu moralitas yang cocok dengan organisasi tempat di mana dia diwadahi dan bahwa moralitas lain bukan hanya saja mustahil tetapi juga fatal apabila kita mencoba-coba menirunya. Jika perspektif ini secara konsekuen kita terapkan, kita harus mempertanyakan tiga hal yang menurut Durkheim dipandang relevan sebagai pisau analisa, yakni: (1) Apakah fungsi polisi itu telah diwadahi dalam kerangka acuan sesuai kebutuhan masyarakatnya?, (2) Bagaimana hubungan struktural polisi dengan sistem sosial atau sub sistem dalam institusinya?, dan (3) Bagaimana pola tindakan polisi sesuai dengan kerangka acuan?. Dengan demikian untuk memulai mendudukan peran polisi secara fungsional P.R. yang dilemparkan oleh para

pakar terutama dari bapak Satjipto Rahardjo juga para pakar lainnya Miftah Thoha, Barda Nawawi, Cacuk Sudarjanto sebenarnya perlu ditelaah lebih lanjut dan benang merah ke arah mana kehidupan sosial ini berlangsung, tentu hal ini sangat berguna sebagai acuan dalam upaya membangun polisi Indonesia masa depan.

## 5. Penutup

Bahwa moralitas atau etika itu tidak bisa dianggap hanya menyangkut ajaran normatif tentang baik buruk, melainkan suatu sistem fakta yang diwujudkan, yang terkait dalam keseluruhan sistem sosial. Moralitas juga bukan saja menyangkut sistem perilaku yang sewajarnya, melainkan juga sistem yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan, dan ketentuan ini adalah sesuatu yang berada di luar diri manusia si pelaku dan sifatnya memaksa, demikian menurut Durkheim (1961).

Akhirnya saya tutup tulisan saya ini yang masih jauh dari kebenaran, kekurangjelasan yang diterima oleh pembaca semoga bukan menjadi fitnah, saya hanya ingin mengajak untuk memahami lahirnya gejala-gejala sosial secara wajar dan khususnya yang menyangkut diri kita polisi saat ini.

### Buku-buku Rujukan:

- Bertens, K., 1987. Fenomenologi Eksistensial. Gramedia, Jakarta.
- Durkheim, Emile, 1961. Moral Education. Free Press, New York.
- Rahardjo, Satjipto, 1991. Masalah Dimensi sosial Dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (naskah seminar). Mabes Polri, Jakarta.
- Makalah-makalah seminar pelayanan masyarakat oleh Polri, Mabes Polri, 1994, Jakarta.
- (Kol. Pol. Drs. Bambang Widodo adalah Dosen Sespim Polri).